

PERANAN PEGAWAI TERHADAP PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KB KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Oleh Kaharudin Simamora *)

Intisari

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pegawai terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Populasi dalam penelitian ini diambil dari masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Sesuai dengan hasil penelitian diperoleh keeratan hubungan antara pegawai terhadap pelayanan administrasi adalah 0,986 yang menunjukkan bahwa hubungan/korelasi yang sempurna. Perhitungan determinasi (K_p) diperoleh sebesar 97,21%. Sisanya sebesar 2,79% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil perhitungan diperoleh reresi linier yaitu $Y = 9,806 + 0,854x$ yang menunjukkan tanda positif yang artinya apabila peranan pegawai ditingkatkan, maka pelayanan administrasi akan meningkat juga. Berdasarkan perhitungannya t_{hitung} adalah 33,38 sedangkan t_{tabel} pada taraf kepercayaan 5% dk 32 (∞) = 1,645, ini menggambarkan bahwa peranan pegawai berpengaruh signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kata Kunci : Pegawai, Pelayanan Administrasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini salah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya Pemerintah

Daerah adalah bagaimana menampilkan

~~operator yang profesional memiliki~~
*) Dosen Kop. Wil. I Dpk STIE Sibolga

kompetitif, dan kemampuan memegang

teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas serta fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari berbagai masalah seperti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang professional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan.

Salah satu kerja birokrasi dapat dilihat dari peranan birokrasi pada Dinas Kependudukan catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja

sama dengan Kepala Desa untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsure pelaksana Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki tugas kewenangan dibidang pelayanan public antara lain, registrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan lain-lain yang menyangkut dengan sosialisasi Keluarga Berencana.

Sehubungan dengan hal ini diatas dan keinginan penulis memperoleh pengetahuan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka penulis tertarik untuk menjadikan objek penelitian dan pengamatan adalah Dinas

Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Peranan Pegawai Terhadap Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

Rumusan Masalah

Apakah pegawai berpengaruh terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pegawai berpengaruh terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan

pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hipotesis

Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Sebagai variabel terikat yang dipengaruhi , dimana yang menjadi variabel bebas adalah pegawai dan variabel terikat adalah pelayanan administrasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah Jl.

Ridwan Hutagalung No. 11 Padanan
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 280 orang pada bulan September sampai dengan Oktober 2012.

Sesuai dengan pendapat sugiyono ini, maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 34 orang. Dimana peneliti memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sebanyak 50 orang dan hanya member jawaban 34 orang, pada 26 September sampai 14 Oktober 2012 dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)
2. Wawancara (Interview)
3. Kuesioner

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data melalui :

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Kuantitatif

Untuk mengetahui seberapa besar pelayanan pegawai terhadap pelayanan administrasi dipergunakan perhitungan determinasi (Kp) dengan rumus sebagai berikut :

$$Kp = r^2 \times 100\%$$

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Dimana $t_{tabel} > t_{hitung}$, H_0 diterima. Dan jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka H_a diterima, begitupun jika $sig > \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima H_a ditolak dan jika $sig < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak H_a diterima.

Setelah diketahui t_{hitung} maka pengujian hipotesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

H_0 : Diterima, apabila koefisien korelasi yang diperoleh berada di atas nilai t_{tabel} atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

H_a : Ditolak, apabila koefisien korelasi yang diperoleh berada di bawah nilai t_{tabel} atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$.

PEMBAHASAN

Hasil persamaan regresi linier yang diperoleh yaitu $Y = 9,806 + 0,854x$ dapat disimpulkan bahwa antara pegawai terhadap percepatan

pelayanan mempunyai hubungan kausal (timbale balik) kea rah positif, hal ini karena hasil yang diperoleh bertanda positif yang mempunyai arti yaitu apabila peranan pegawai ditingkatkan maka akan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan juga.

Pengujian korelasi antar variabel penelitian melalui perhitungan angka kasar (Product Moment) diperoleh $r_{xy} = 0,986$. Untuk melihat kadar tinggi rendahnya koefisien korelasi, Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, (2004:147) mengatakan sebagai berikut: Koefisien hanya berkisar antara 0,00 s/d 1,00 yang menunjukkan tand + (positif), tanda – (Negative).

$\pm 0,00$ s/d 0,40 hampir tidak ada korelasi

$\pm 0,21$ s/d 0,20 korelasi rendah

$\pm 0,41$ s/d 0,60 korelasi sedang

$\pm 0,61$ s/d 0,80 korelasi tinggi

$\pm 0,81$ s/d 1,00 korelasi sempurna

Bila $r_{xy} = 0,986$ atau mendekati 1, maka korelasi antara 2 (dua) variabel dikatakan sempurna. Jadi dapat dikatakan peranan pegawai ada hubungannya dengan percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Koefisien determinasi = 0,9721, ini member arti bahwa percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah ditentukan peranan pegawai sebesar 97,21% dan sisanya ditentukan oleh variabel diluar dari variabel penelitian yang dipakai.

KESIMPULAN

Berdasarkan model regresi yang diperoleh maka dapat disimpulkan

persamaan regresi adalah $Y = 9,806 + 0,854x$ dapat dijelaskan konstanta sebesar 9,806 menyatakan bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel pegawai, maka nilai pelayanan administrasi adalah 9,806. Koefisien regresi sebesar 0,854 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) skor atau nilai peranan pegawai akan memberikan peningkatan skor pelayanan administrasi sebesar 0,854 hal ini berlaku jika diasumsikan variabel-variabel lain dalam penelitian ini konstan.

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 34 responden menunjukkan hubungan yang positif, dimana dapat dilihat perhitungan korelasi product moment diperoleh 0,986. Bila $r_{xy} = 0,986$ atau mendekati 1,

maka korelasi antara 2 (dua) variabel dikatakan positif atau sempurna.

2. Koefisien determinasi = 0,9721, ini berarti bahwa percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah ditentukan peranan pegawai sebesar 97,21% dan sisanya ditentukan oleh variabel diluar dari variabel penelitian yang dipakai.

3. Berdasarkan perhitungan t_{hitung} adalah 33,38 sedangkan t_{tabel} pada taraf kesalahan 5% dk 32 (∞) = 1,645, ini menggambarkan bahwa peranan pegawai

berpengaruh signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A.W.Widjaja, 2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta : Rajawali.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Musanef, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Riawan Tjandra, 2005, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaruan.

STIE Al-Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah, 2006. Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi, Sibolga.

Wasstiono, Sadu. 2002, Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, Jatinangor : Pusat kajian Pemerintahan STPDN.